

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan proses multimediasi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping itu mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi memiliki tiga tujuan inti antarlain peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro, 2016).

Pada tahun 2030, Indonesia diprediksi akan mengalami era bonus demografi. Bonus demografi merupakan kondisi dimana jumlah penduduk yang berada pada usia produktif lebih banyak dibanding penduduk yang tidak produktif. Sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam pembangunan dalam pembangunan bangsa. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang begitu besar merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, sebagai input dalam proses produksi barang dan jasa sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, serta sebagai penggerak dalam suatu perekonomian (Ahmaddien & Sa'dia, 2020).

Disisi lain jumlah penduduk dan angkatan kerja yang begitu besar membuktikan besarnya tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya harus bisa dimanfaatkan dengan baik

dengan cara menyediakan lapangan kerja. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa motif ekonomi dan kependudukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi seseorang untuk bekerja dengan jam kerja panjang maupun pendek (Rachma et al., 2020).

Tenaga kerja merupakan salah satu isu penting dalam perekonomian suatu negara. Tenaga kerja adalah setiap orang/individu/masyarakat yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Peran tenaga kerja dalam suatu perekonomian sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Peran penduduk dalam dunia kerja bisa dilihat dalam tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Berdasarkan Global Gender Gap Report 2024, Gender gap Indonesia menempati peringkat ke 100 dari total 146 negara dimana peringkat ini turun dari peringkat 87 pada tahun sebelumnya, artinya Indonesia masih belum mampu mengatasi permasalahan kesenjangan gender. Program, kebijakan, dan aktivitas pembangunan sering kali tidak efektif karena tidak mempertimbangkan perbedaan yang ada di masyarakat, baik yang bersifat alami maupun yang dibentuk oleh struktur sosial dan budaya (Tanziha Ikeu et al., 2021).

Meskipun Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, tingkat partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja relatif masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN. Berdasarkan data komparatif internasional, TPAK perempuan Indonesia berdasarkan pada kisaran 52,6 persen, angka yang lebih rendah dibandingkan Vietnam, Thailand, Singapura dan Kamboja yang telah mencapai tingkat partisipasi angkatan kerja

perempuan di atas 58 persen hingga lebih dari 70 persen (TheGlobalEconomy, 2024).

Tabel 1. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Negara ASEAN 2024 (persen)

Negara	TPAK Perempuan
Kamboja	73,9
Vietnam	69,1
Singapura	62,3
Laos	61,5
Thailand	58,9
Brunei Darussalam	53,2
Indonesia	52,6
Malaysia	51,6
Filipina	49,9

Sumber: TheGlobalEconomy data diolah

Data diatas menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi tenaga kerja perempuan secara maksimal dibandingkan negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang sebanding. Selain itu, tren menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia cenderung mengalami stagnasi dalam jangka Panjang. Dalam periode lebih dari tiga dekade, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya mengalami peningkatan yang relatif lambat dan fluktuatif, meskipun terjadi perubahan dalam struktur ekonomi, peningkatan pendidikan perempuan serta ekspansi sektor formal dan informal (Trendonify, 2024).

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencerminkan sejauh mana perempuan usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Tingginya tingkat partisipasi perempuan berkontribusi

terhadap peningkatan produktivitas nasional, pengurangan kemiskinan, serta penguatan kesejahteraan rumah tangga dan stabilitas sosial (World Bank, 2023).

Perempuan memiliki hak yang sama untuk mengambil bagian dalam inisiatif pembangunan seperti halnya laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan adalah indikator yang penting yang menunjukkan seberapa aktif perempuan berpartisipasi dalam tenaga kerja (Perrotta, 2018). Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat luas (Hakiki et al., 2016).

Tabel 1. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Indonesia 2024 (persen)

tahun	Jenis Kelamin	
	laki-laki	perempuan
2020	82,41	53,13
2021	82,27	53,34
2022	83,87	53,41
2023	84,26	54,52
2024	84,66	56,42

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 1.1 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut jenis kelamin di Indonesia pada periode 2020-2024, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Pada kelompok laki-laki, tingkat partisipasi angkatan kerja selalu berada diatas 82 persen. Berbeda dengan laki-laki, partisipasi angkatan kerja perempuan berada pada tingkat yang lebih rendah yaitu hanya mencapai diatas persen 53 persen.

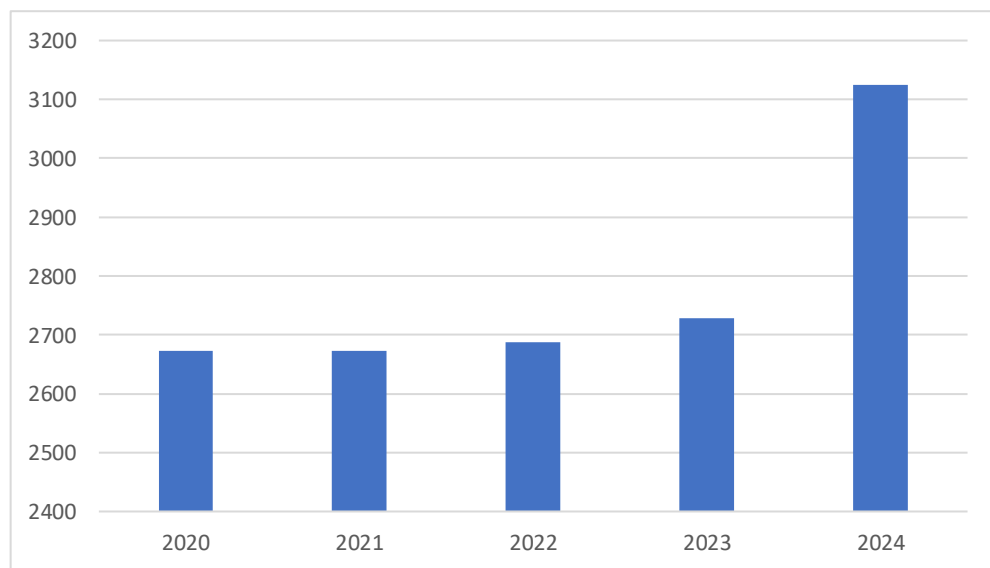
Secara teoritis, teori penawaran tenaga kerja (*Labor Supply Theory*) menjelaskan bahwa keputusan individu untuk berpartisipasi dalam pasar kerja merupakan hasil dari pilihan rasional antara bekerja dan tidak bekerja, yang dipengaruhi oleh tingkat upah, pendapatan non upah, serta kondisi ekonomi dan kebijakan publik yang berlaku. Dalam konteks perempuan, keputusan untuk bekerja menjadi lebih kompleks karena adanya pertimbangan peran domestik dan tanggung jawab rumah tangga, sehingga perubahan insentif ekonomi sangat menentukan tingkat partisipasi mereka dipasar kerja (Borjas, 2015).

Bertambahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan disebabkan antara lain oleh kondisi sosial ekonomi yang membaik sehingga berpengaruh pada faktor-faktor produksi. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi adalah upah minimum (R. A. Sari & Sugiharti, 2022). Alasan utama perempuan berpartisipasi dalam angkatan kerja adalah karena kebutuhan (Tsaniyah & Sugiharti, 2021). Upah minimum merupakan faktor yang dianggap penting karena jika tingkat upah tinggi, masyarakat (angkatan kerja) akan semakin banyak masuk kedalam pasar tenaga kerja yang akan meningkatkan juga tingkat partisipasi angkatan kerja. Data mengenai kenaikan upah di berbagai negara, terutama negara maju maupun negara berkembang menunjukkan bahwa berkaitan erat antara kenaikan upah para pekerja dengan kenaikan produktivitas.

Penerapan upah minimum dapat menimbulkan efek ganda terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan. Disatu sisi, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya tarik pasar kerja formal dan mendorong perempuan untuk bekerja, terutama bagi rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah.

Disisi lain, kenaikan upah minimum juga berpotensi menyebabkan pengusaha mengurangi permintaan tenaga kerja, khususnya pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan, seperti sektor informal, padat karya dan sektor jasa domestik.

Upah minimum yang tinggi dapat menarik lebih banyak orang ke pasar tenaga kerja, hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan partisipasi angkatan kerja (Herman, 2023). Upah minimum dapat berdampak pada daya tarik pekerjaan dan partisipasi angkatan kerja. Hasilnya ada hubungan yang cukup besar antara upah minimum dan tingkat partisipasi angkatan kerja, dan kebijakan yang meningkatkan upah minimum dapat menjadi teknik yang efektif untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja (Amaliyah & Arif, 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 Rata-rata Upah Minimum Setiap Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024 (Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.2 Upah minimum di Indonesia dari tahun 2020-2024 secara umum terus meningkat setiap tahunnya. Upah minimum yang akan diterima

oleh tenaga kerja bergantung pada jumlah tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Upah minimum, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diimplementasikan secara provinsi melalui UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan standar hidup layak. Kenaikan upah minimum akan memberikan stimulus kepada seseorang untuk terjun kedalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu semakin tinggi upah yang ditawarkan maka akan mendorong naiknya tingkat partisipasi angkatan kerja. Naiknya upah minimum kedepannya bertujuan untuk mendorong kesejahteraan dari masyarakat sehingga masyarakat mendapat kehidupan yang layak (Muna, 2023).

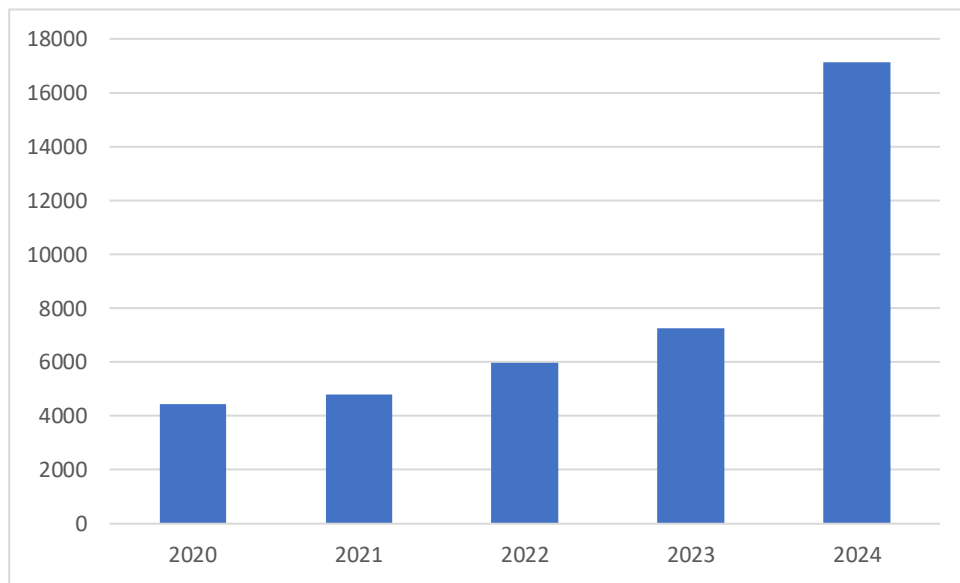
Penelitian Sajati & Pujiarti (2025) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Murianti et al., (2022), dan Aini et al., (2022) serta Sarri & Sugiharti (2022). Sebaliknya, penelitian Sasmitaningroh & Wasi (2025), Jamila & Murianti (2025) menunjukkan upah minimum memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Kenaikan tingkat output dan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan (Todaro, 2016). Hal ini menunjukkan hubungan yang positif antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja. Tujuan dari investasi adalah mengharapkan keuntungan di masa depan dan mengantisipasi tekanan inflasi. Pembentukan modal juga berarti pembentukan

keahlian yang kerap kali berkembang sebagai akibat pembentukan modal. Dengan demikian, investasi apabila didukung dengan kemampuan tenaga kerja dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menunjang perekonomian (Anugrawati & Iwang, 2022)

Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Seperti yang diketahui, dampak langsung dari investasi terhadap perekonomian lokal dapat melalui empat saluran, diantaranya demonstrasi, persaingan, pengetahuan, dan mobilitas tenaga kerja. Investasi merupakan pembelanjaan penanaman modal seperti perlengkapan produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa. Kenaikan investasi akan berdampak pada peningkatan output apabila nilai investasi lebih dari depresiasinya. Kenaikan output akan meningkatkan beberapa input produksi, salah satunya adalah permintaan tenaga kerja (Oktaviani & Lis Purnamadewi, 2015)

Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin tersedianya lapangan pekerjaan kepada setiap angkatan kerja yang telah memasuki usia kerja dan dapat mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia. Menurut Khariza (2019), Ahmaddien & Sa'dia (2020) menyimpulkan bahwa pengaruh penanaman modal terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja adalah signifikan dan hubungannya positif. Hal ini berarti bahwa setiap adanya penambahan investasi yang masuk akan mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja terserap.



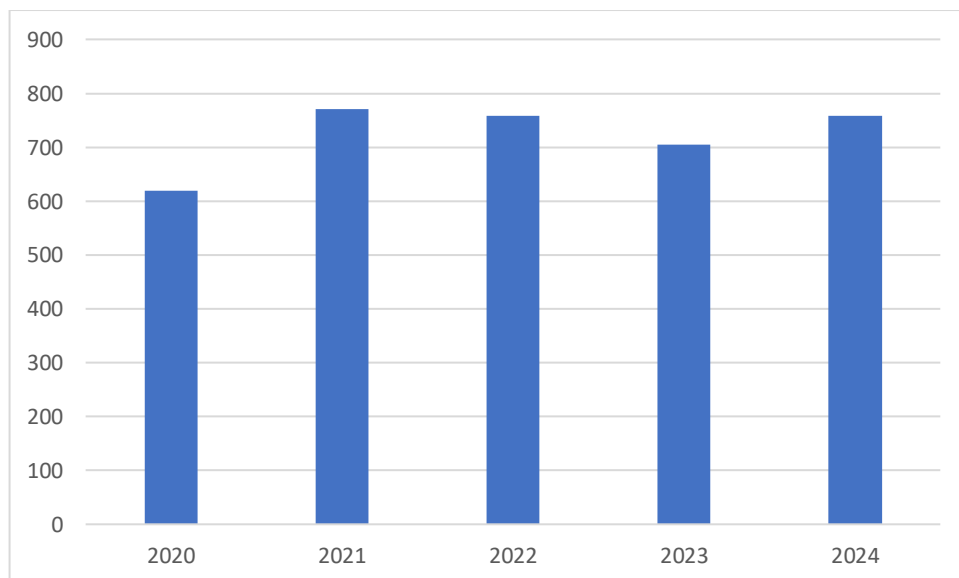
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1. 2 Investasi di Indonesia tahun 2020-2024 (Juta US\$)

Berdasarkan Gambar 1.2 data realisasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Realisasi investasi tertinggi terjadi pada tahun 2024, mencapai 17.000 juta US\$, sementara realisasi terendah tercatat pada tahun 2020 dengan angka 4.000 juta US\$. Tren investasi menunjukkan peningkatan yang baik, terdapat peningkatan yang signifikan yang terjadi pada tahun 2023, dimana realisasi investasi meningkat menjadi 7.000 juta US\$. Dengan investasi yang tinggi, hal itu tentunya mampu meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat menyebabkan jumlah penyerapan tenaga kerja meningkat dengan mencapai angka output yang paling tinggi (Arisetyawan et al., 2024).

Pemerintah selaku fasilitator serta pengawas tentunya akan menyediakan lapangan kerja serta akan mengawasi produk/kebijakan yang dikeluarkannya. Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu Tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian

dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya (Anugrawati & Iwang, n.d.) Yang salah satu tujuannya yaitu untuk menstabilkan kesempatan kerja. Belanja pemerintah merupakan salah satu ukuran yang mempengaruhi perekonomian dan bentuk stimulus yang dilakukan pemerintah pada tahap awal perkembangan. Pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah (Junaedi, 2016).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1. 3 Belanja Langsung Pemerintah di Indonesia tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disajikan pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa belanja pemerintah di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, belanja langsung pemerintah tercatat sebesar 619,5 triliun rupiah. Nilai tersebut mencerminkan upaya dalam menghadapi kondisi perekonomian yang terdapat oleh pandemi COVID-19. Dan pada tahun berikutnya mulai dilakukan penyesuaian

kebijakan fiskal seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional. Pemerintah mulai mengarahkan pengeluaran negara secara lebih selektif ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas peran fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pembangunan di berbagai sektor strategis. berbagai kebijakan fiskal yang diarahkan pada penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas akses ekonomi, termasuk bagi perempuan. Penelitian oleh (Sulastri & Handayani 2021) menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah secara signifikan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Rahayu, 2022) bahwa belanja pemerintah daerah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur sosial berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas dan keterlibatan perempuan di pasar tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan salah satu startegi penting untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi variabel baru yang belum banyak diteliti, yaitu dengan menggunakan variabel dependen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan variabel independen Belanja Pemerintah yang berpotensi mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Melalui berbagai program dan alokasi anggaran dapat menciptakan kesempatan kerja. Salah satunya yaitu program kartu pra kerja yang merupakan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusa yang menyediakan pelatihan kerja, peningkatan keterampilan (*upskilling* dan *reskillin*). Program ini

bersifat inklusif gender dan diikuti oleh proporsi peserta perempuan yang relatif tinggi. Melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja, program ini berkontribusi terhadap peningkatan *employability* perempuan, khususnya di sektor formal dan semi formal, sehingga mendorong peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia Tahun 2000-2024.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah secara parsial dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tahun 2000-2024?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah secara bersama-sama terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tahun 2000-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah secara parsial dalam jangka panjang maupun jangka pendek

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tahun 2000-2024.

2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah secara bersama-sama terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tahun 2000-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi tenaga kerja dan studi ketenagakerjaan, khususnya terkait dinamika partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu secara spesifik memfokuskan analisis pada tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, sehingga memberikan perspektif gender yang lebih tajam dalam kajian pasar tenaga kerja di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pasar kerja.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait pengaruh upah minimum, investasi dan belanja pemerintah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Semoga pengetahuan yang didapat ini bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh penulis dengan baik;
2. Pihak lain, pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai upah minimum, investasi dan belanja pemerintah

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia kepada yang berkepentingan baik dalam penelitian selanjutnya atau sebagai bahan ajar;

3. Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan keputusan pembuatan kebijakan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang setiap variabelnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta beberapa sumber media online yang relevan dan terpercaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan terhitung mulai dari bulan November 2025 sampai dengan Maret 2026 dengan waktu penelitian terlampir

Tabel 1. 3 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2025-2026							
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Pengajuan Judul								
2	Penyusunan Usulan								
3	Sidang Usulan Penelitian								
4	Penyusunan Hasil Penelitian								
5	Sidang Seminar Hasil								
6	Sidang Skripsi								